

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, berdaya guna berhasil guna, bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan good governance, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat merumuskan dan menyusun revisi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya mewujudkan **good governance**.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKj ini.

Painan, Februari 2018
KEPALA DINAS

Drh. Hj. HAZRITA, MM
NIP. 19590613 198603 2 001

IKHTISAR EXECUTIVE

Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lkj) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas mandat yang diamanatkan dalam :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2017 ini merupakan laporan kinerja tahun kedua atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2016 - 2021. Laporan kinerja ini memberikan informasi tingkat pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2017.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir dalam kurun waktu Tahun 2016 s/d 2021 secara bertahap akan mewujudkan Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yakni “ **Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera**. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Dinas teknis berusaha mewujudkan misi ke empat dari Kepala Daerah yaitu : Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan

Sebagai upaya untuk mencapai misi tersebut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menetapkan tujuan strategis yakni **Terwujudnya peningkatan produksi dan pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis** dengan dua sasaran strategis berupa :

1. **Meningkatkan nilai produksi peternakan**
2. **Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis**

Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat capaiannya. Sasaran strategis ini diwujudkan secara bertahap melalui program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan yang setiap akhir tahun dievaluasi melalui Laporan Kinerja (LKj). Uraian lebih terinci mengenai target dan tingkat ketercapaian indikator kinerja dapat dilihat pada Bab III Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, pada tahun 2017, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan 10 program dan 34 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4,227,111,220,-. Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 2 sasaran strategis dan 1 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut :

Tabel. 1
Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dalam Beberapa Klasifikasi Pengukuran/Penilaian

Sasaran Strategis	Target Indikator Kinerja Sasaran (Outcome/Output) (indikator)	Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)			
		Sangat Baik (100%) (indikator)	Baik (85% sd < 100%) (indikator)	Sedang (70% sd < 85%) (indikator)	Kurang Baik (0 sd < 70% (indikator)
1. Meningkatkan nilai Produksi peternakan	Persentase peningkatan produksi daging		95,73		
	Persentase peningkatan produksi telur	104,30			
2. Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	120,93			
Jumlah		2	1	0	0

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana kinerja (*performance plan*) sebanyak 3 indikator sasaran :

- Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 2 indikator sasaran strategis.
- Terlaksana dengan “baik” sebanyak 1 indikator sasaran strategis.

Rincian atas capaian indikator kinerja sasaran yang terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 2 indikator sasaran strategis tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Tabel. 2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Sasaran (100%)
1	Meningkatkan nilai Produksi peternakan a. Persentase peningkatan produksi daging - Peningkatan populasi ternak unggul - Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak b. Persentase peningkatan produksi telur - jumlah penangkar itik bayang yang difasilitasi - jumlah penangkar ayam lokal yang difasilitasi	118 100 100 100
2	Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis a. Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis - Tersedianya vaksin SE - Tersedianya vaksin rabies - Terlaksananya pengawasan terhadap hewan, bahan asal hewan dan produk asal hewan - Terlaksananya pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies	100 100 100 95.31

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran dan kerja sama yang baik antara pemerintah selaku fasilitator dan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Namun demikian masih perlu terus dilakukan pembangunan dan pembinaan secara berkesinambungan sehingga apa yang telah dicapai di tahun ini dapat lebih baik dan optimal lagi ditahun yang akan datang. Sehingga apa yang menjadi visi dari Kepala Daerah

untuk **Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera** dapat terlaksana dengan baik.

Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100 %) disebabkan hambatan sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya pengurangan hewan pembawa rabies disebabkan tidak terealisasinya rencana penganggaran untuk kegiatan pemusnahan hewan tersangka rabies, dari target dalam perencanaan renstra tahun 2017 ditargetkan pengurangan hewan pembawa rabies sebanyak 4.000 umpan tersedia anggaran hanya untuk 3.200 umpan. Target capaian kinerja adalah 80% dari umpan atau 2.560 ekor dan terealisasi sebanyak 2.440 ekor dari target dalam DPA tahun 2017 sebanyak 2.560 ekor (95,31%)

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/permasalahan-permasalah diungkapkan di dalam bab-bab Laporan Kinerja ini.

Berbagai keberhasilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Painan, Februari 2017
Kepala Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan

Drh. Hj. HAZRITA, MM
NIP. 19590613 198603 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I. PENDAHULUAN	11
1.1. Gambaran Umum	11
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	14
1.3. Landasan Hukum	25
1.4. Sistematika Penulisan	26
BAB II. PERENCANAAN KERJA	29
2.1. Perencanaan Kinerja	29
2.2. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan	30
2.3. Perjanjian Kerja	32
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1. Capaian Kinerja	35
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	36
3.3. Capaian Kinerja	37
3.4. Akuntabilitas Keuangan	42
BAB IV. PENUTUP	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	
Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	
Lampiran 3 Penghargaan yang diterima	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dalam Beberapa Klasifikasi Pengukuran/Penilaian	5
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	6
Tabel 2.1.Misi, Tujuan dan sasaran	30
Tabel 2.2. Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017	33
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	34
Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Dalam RPJMD Tahun 2016-2021	34
Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017.....	36
Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan .	36
Tabel 3.3. Capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.....	37
Tabel 3.4.1. Perkembangan Produksi Daging dan Populasi Ternak di Kabupaten Pesisir Selatan tahu 2015-2017	39
Tabel 3.4.2. Perkembangan dan Persentase Produksi dan Konsumsi Telur serta Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015-2017	40
Tabel 3.4.3. Perkembangan Kasus Penyakit Hewan di kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017	41
Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang Sasaran Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2017	42
Tabel 3.6. Realisasi Angagran Per Program Kegiatan Tahun Anggaran 2017	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	16
---	----

I. PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang –undang tersebut menyatakan bahwa azas – azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (Lkj). Penyusunan LKj Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi

pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagai salah kabupaten yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pertanian, Kabupaten Pesisir Selatan dengan potensi sumberdaya alam yang tinggi dan diperkaya keanekaragaman hayati menjadi sektor pertanian yang memiliki keunggulan komparatif tinggi. Diantara sektor pertanian tersebut peternakan mempunyai potensi yang tinggi karena untuk Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah sentra peternakan sapi potong dengan populasi tertinggi di Sumatera Barat. Potensi dan keunggulan Pesisir Selatan di sektor peternakan sapi potong ini adalah kabupaten Pesisir Selatan mempunyai plasma nutfah berupa sapi Pesisir dan itu sudah diakui secara nasional. Disamping itu potensi alam yang ada cukup mendukung pengembangan usaha peternakan. Oleh karena itu potensi ini perlu dikembangkan melalui pengembangan sistem dan usaha mulai dari hulu sampai kehilir (agribisnis) yang akan menghasilkan produk dan jasa usaha peternakan yang memiliki daya saing tinggi. Disamping itu, agribisnis diharapkan dapat mampu meningkatkan nilai tambah sektor peternakan dan menjadi wahana yang penting untuk menanggulangi kemiskinan di pedesaan.

Pembangunan wilayah ekonomi berbasis pertanian yang diwujudkan dalam suatu program pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistis untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan pertanian dalam hal ini pembangunan peternakan tersebut dirumuskan dalam empat program yaitu program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak, program Pengembangan Agribisnis Peternakan. Untuk mendukung program pengembangan agribisnis dilaksanakan melalui pengembangan kawasan

agribisnis. Hal tersebut diperlukan penetapan kawasan agribisnis yang disesuaikan dengan keunggulan masing-masing daerah, baik kompetitif maupun komparatif sebagai basis usaha untuk menghasilkan produk-produk peternakan yang berdaya saing sesuai tuntutan pasar.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri no 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sektor peternakan merupakan bagian dari urusan pertanian yang dikelompokkan kedalam urusan Pilihan dengan 10 program utama.

Pembangunan sektor peternakan maupun kesehatan hewan merupakan penyumbang perbaikan perekonomian masyarakat karena disamping bertani, masyarakat masih bisa menjadikan usaha beternak sebagai usaha tambahan maupun sebagai tabungan bagi keluarga. Hal ini dapat dicerminkan dari data statistik Pesisir Selatan tahun 2016, dimana sebagian besar Kepala Keluarga (KK) yang merupakan keluarga yang berusaha disektor pertanian sekitar 75.603 orang (48,50% dari jumlah penduduk yang bekerja).

Dari semua fakta diatas maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka dibentuklah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penggunaan keuangan dan pelaksanaan fisik pelaksanaan kegiatan pembangunan peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2017.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi adalah:

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- ✓ Perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ✓ Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ✓ Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang peternakan dan Kesehatan Hewan
- ✓ Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan .

1.2.2. Susunan Organisasi

Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat

- *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
- *Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan Pelaporan*

- 3) Bidang Produksi Peternakan
 - *Seksi Perbibitan*
 - *Seksi Pakan dan Teknologo Peternakan*
 - *Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak*

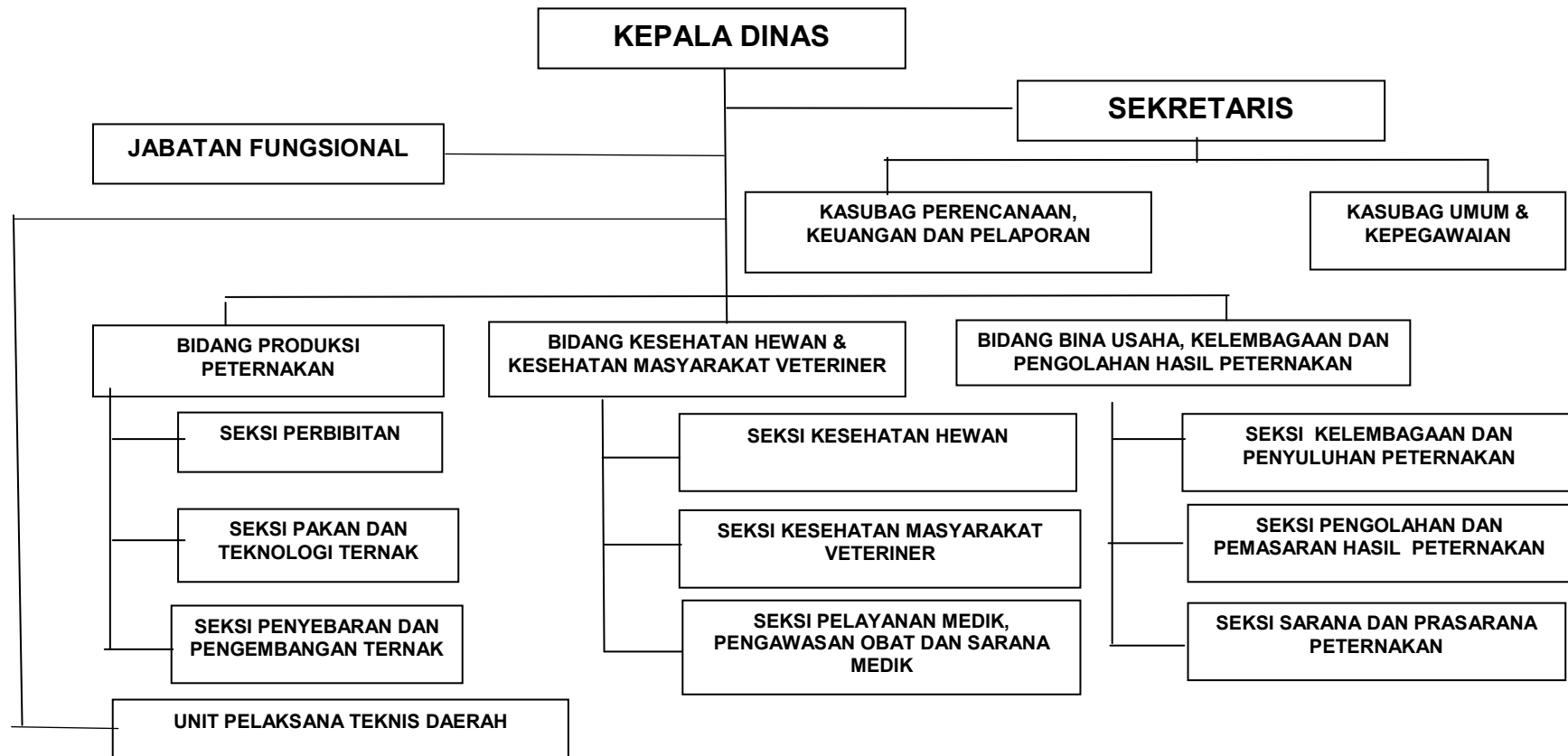
- 4) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - *Seksi Kesehatan Hewan*
 - *Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner*
 - *Seksi Pelayanan Medik, Pengawasan Obat Hewan dan Sarana Medik*

- 5) Bidang Bina Usaha Peternakan, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan
 - *Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Penyuluhan Peternakan*
 - *Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan*
 - *Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan*

- 6) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan



((sumber : Perda Kab. Pessel Nomor 8 tahun 2016)

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pemerintah daerah dibidang peternakan dan kesehatan hewan

1) Kepala Dinas

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2) Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian bidang-bidang di lingkungan dinas;
- b. pengkoordinasian sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas perencanaan dan pelaporan;
- d. pengawasan lingkup sekretariat dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. *Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian* : yang mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, kehumasan dan protokol serta penataan barang milik negara di lingkungan Dinas
- b. *Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan* : yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program,

anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan

3) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan operasional kegiatan bidang Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan bidang Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. Pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. Pembagian pelaksanaan tugas urusan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ; dan
 - e. Pengawasan pelaksanaan tugas urusan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :

- a. **Seksi Kesehatan Hewan; mempunyai tugas** pokok melakukan perumusan kebijakan teknis penyiapan bahan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan
- b. **Seksi Kesehatan masyarakat veteriner** ; mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- c. **Seksi Pelayanan Medik, Pengawasan Obat Hewan dan Sarana Medik;** mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pelayanan medik, pengawasan obat dan Sarana Medik Hewan.

4) Bidang Produksi Peternakan

Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang perbibitan, pakan dan teknologi peternakan serta penyebaran dan pengembangan ternak

Bidang Produksi Peternakan terdiri dari :

- a. **Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan;** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Produksi Peternakan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pakan dan Teknologi Peternakan serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pakan dan Teknologi Peternakan
- b. **Seksi Perbibitan;** mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang produksi peternakan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perbibitan ternak
- c. **Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak ;** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Produksi Peternakan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Penyebaran dan Pengembangan Ternak

5). Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan hasil Peternakan

Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan hasil Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang budi daya, produksi, sarana prasarana peternakan, pakan, teknologi, penyuluhan peternakan, bina usaha, serta pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan hasil Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional kegiatan Bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan
- b. Pengkoordinasian kegiatan seksi di bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan
- d. Pengawasan dan evaluasi kegiatan bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan Pembagian pelaksanaan tugas bidang peternakan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya

Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan hasil Peternakan terdiri dari :

- a. **Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Penyuluhan Peternakan;** yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang peternakan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Peternakan
- b. **Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan pelaksanaan di bidang Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Peternakan

- c. **Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;** yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Sarana Prasarana Peternakan.

6) Unit Pelaksana Teknis

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibentuk Puskeswan Terpadu sebanyak 6 Unit yang melayani 15 kecamatan yang ada di kabupaten Pesisir Selatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi tersebut diatas didukung oleh Sumber daya aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berjumlah 41 orang PNS dan 21 orang tenaga sukarela dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Berdasarkan golongan ruang

- 1) Golongan IV : 5 orang
- 2) Golongan III : 21 orang
- 3) Golongan II : 5 orang

b. Berdasarkan pendidikan

- 1) Pasca Sarjana : 4 orang
- 2) Dokter Hewan : 6 orang
- 3) Sarjana peternakan : 20 orang
- 4) D3 : 2 orang
- 5) D4 : 2 orang
- 6) SLTA : 7 orang

c. Berdasarkan jabatan

- 1) Eselon II : 1 orang
- 2) Eselon III A : 1 orang
- 3) Eselon III B : 3 orang

4) Eselon IVA	: 11 orang
5) Medis lapangan	: 4 orang
6) Paramedis	: 16 orang
7) Inseminator	: 21 orang
8) Tenaga administrasi	: 7 orang
9) Tenaga sukarela	: 21 orang

1.2.3. Isu Strategis

Isu strategis yang mempengaruhi pembangunan peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

a) Pada aspek lingkungan strategis global dan regional ; pembangunan sektor peternakan tidak akan terlepas dari aturan perdagangan bebas. Dalam perdagangan bebas tersebut pembangunan peternakan terkait dengan diberlakukannya *technical barrier on trade, sanitary and phytosanitary* dan liberalisasi dalam perdagangan dan jasa. Disini kita harus meningkatkan produktifitas peternakan dalam negeri.

b) Pengaruh lingkungan strategis Nasional

- 1) Meningkatnya pemotongan ternak (mengurangi populasi ternak)
- 2) Pertambahan populasi belum dapat mengimbangi peningkatan pemotongan ternak
- 3) 20 % dari ternak yang dipotong merupakan ternak betina produktif
- 4) Adanya penyakit menular (*zoonosis*) seperti SE, anthrak dan flu burung, menyebabkan pengurangan terhadap populasi ternak.
- 5) Adanya program nasional percepatan UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Betina Wajib Bunting)
- 6) Kurangnya perhatian terhadap kelestarian plasma nutfah (salah satunya sapi pesisir dan itik bayang).

c) Pada lingkungan strategis politik dan ekonomi, sektor peternakan akan berhadapan dengan pergeseran fungsi dan peranan pemerintah termasuk dengan diberlakukannya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Daerah.

d) Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
6. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

e) Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan selama Tahun 2017. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Analisis atas capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perubahan Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR, sebagai pengantar penyampaian LKj

IKHTISAR EKSEKUTIF, merupakan rangkuman dari hasil capaian

DAFTAR ISI, berisi urutan isi laporan

DAFTAR TABEL, berisi tabel-tabel LKj

DAFTAR GAMBAR, berisi gambar-gambar LKj

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

- ❖ Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
- ❖ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- ❖ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- ❖ Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan (Renstra/RPJMD);
- ❖ Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- ❖ Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja alternative solusi yang telah dilakukan;
- ❖ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- ❖ Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
3. Penghargaan-penghargaan yang diterima Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
4. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja tahun 2017 disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2016-2021 yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan periode tahun 2016-2021 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 adalah : ***Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera.***

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai dinas teknis berkewajiban mewujudkan visi Kepala Daerah tahun 2016-2021 tersebut.

2.1.2. M i s i

Sebagai penjabaran dari visi tersebut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai lembaga teknis daerah melaksanakan misi keempat dari kepala daerah yaitu : **Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan**

2.1.3. Tujuan dan Sasaran strategis

a. Tujuan Strategis

Untuk mewujudkan misi keempat dari kepala daerah maka tujuan strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah

Terwujudnya peningkatan produksi dan pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis

b. Sasaran Strategis

- Meningkatkan nilai produksi peternakan.
- Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis

Tabel 2.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI		TUJUAN	SASARAN	
4.	Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.	Terwujudnya peningkatan produksi dan pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis	1	Meningkatkan nilai produksi peternakan
			2	Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis

2.2. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006, program dan kegiatan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2017 di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi :

a. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan :

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 2) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 5) Penyediaan alat tulis kantor
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 9) Penyediaan makanan dan minuman
- 10) Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 11) Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah

-
- b. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur*, yang meliputi kegiatan :
- 1) Pengadaan Mebeleur kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- c. *Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur*, dengan kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- d. *Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak* dengan kegiatan :
- 1) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
 - 2) Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies
 - 3) Pegawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah
 - 4) Penyusunan naskah akademis Ranperda Rabies
- e. *Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan*, dengan kegiatan :
- 1) Pembibitan dan Perawatan Ternak
 - 2) Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
 - 3) Peningkatan Mutu Genetik melalui IB
 - 4) Pemberdayaan kelembagaan dan Usaha Peternakan
 - 5) Penyusunan action plan pengembangan kawasan
 - 6) Pengembangan Ternak untuk Menunjang Percepatan Pembangunan
 - 7) Budi daya ternak itik bayang
 - 8) Budi daya ayam lokal
 - 9) Penerapan Teknologi Peternakan
 - 10) Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana pertanian mendukung peternakan
 - 11) Pengadaan Perlengkapan Petugas
- f. *Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah* dengan kegiatan :

Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

- g. *Program Peningkatan Agribisnis Peternakan* dengan kegiatan :
Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau tahun 2018
- h. *Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan* dengan kegiatan :
Penerapan Teknologi Peternakan
- i. *Program Peningkatan Sarana Prasarana* dengan kegiatan :
Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana Peternakan mendukung Pertanian

2.3. Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2017 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2016 – 2021.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan, mengacu pada dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 yang telah ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2017. Perjanjian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 mengalami beberapa revisi sesuai dengan cascading kinerja yang telah disusun dengan penjelasan tercantum pada tabel 2.2.

Tabel. 2.2.
Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		KET
	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	
1	Meningkatkan produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Peternakan	Meningkatkan nilai produksi peternakan	1.1 Peningkatan produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Peternakan yang berdaya saing a. Persentase peningkatan produksi daging. b. Persentase peningkatan produksi telur	Peningkatan produksi peternakan a. Persentase peningkatan produksi daging. b. Persentase peningkatan produksi telur	2,11 3,73	2,11 3,73	
2	Meningkatkan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat veteriner	Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis	2.1 Jumlah akseptor IB yang dilayani Jumlah puskesmas punya tenaga medis	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	5000 5	1,5	

Dari revisi yang telah dilakukan maka Rincian penetapan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2017 sebagai tertuang dalam Tabel. 2.3.

Tabel. 2.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan nilai Produksi peternakan	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	
		- produksi daging (%)	2,11
		- produksi telur (%)	3,73
	Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	1.5

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan Dalam RPJMD 2016-2021

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2017
Misi 4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan		
1. Peningkatan produksi utama :		
a. Padi	Ton	322,752
b. Jagung	Ton	111,808
c. Daging	Kg	1,205,295
d. Telor	Kg	1,580,747
e. Ikan	Ton	48,500

Sumber: RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result) untuk mengetahui celah kinerja (performance gap). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement).

CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati tahun 2016 – 2021. Sasaran strategis yang dimaksud merupakan acuan dari pelaksanaan program/kegiatan dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, dan hasil.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
MISI 4 : MENINGKATKAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
Tujuan : Terwujudnya peningkatan produksi dan pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis							
1.	Meningkatkan nilai Produksi peternakan	1.	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				
			a. Daging	Kg	1.205.295	3.781.317	313,73
			b. Telur	Kg	1.580.747	2.170.739	137,32
2.	Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis	2.	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	%	1,5	22.72	152,94
Rata-rata Capaian Indikator 2 Sasaran Strategis : 3 Indikator Kinerja							201,33

Dari tabel 3.2. dapat dilihat, capaian rata-rata 3 (tiga) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2017 sebesar 201,33 %. Sebanyak 2 (dua) indikator nilainya

Sangat Baik dengan prediket **Sangat Berhasil**, sebanyak 1 (satu) indikator nilainya **Baik** dengan prediket **Berhasil**.

3.3. CAPAIAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2. selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sesuai dengan Rencana strategis dinas yang telah disusun untuk tahun 2016 - 2021 maka ada beberapa indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja utama, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3.

Capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatkan nilai Produksi peternakan	Peningkatan Produksi Hasil peternakan				100,01
		a. Daging (%)	%	2,11	2.02	95,73
		b.Telur (%)	%	3,73	3.89	104,30
2.	Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	%	1,5	22,72	120.93

Dari tabel 3.4. dapat dilihat , ada 2 sasaran strategis yang ingin dicapai untuk tercapainya tujuan “Terwujudnya peningkatan produksi dan pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis”

Dilihat per sasaran strategis capaian yang dari indikator kinerja sasaran strategis pertama adalah 100,01 %. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk berhasil dengan kategori baik.

1. Meningkatkan nilai Produksi peternakan

Meningkatkan nilai Produksi peternakan, dibandingkan dengan capaian yang telah dicapai tahun 2016, capaian yang diperoleh tahun 2017 jumlah peningkatan nilai produksi peternakan lebih baik, dimana jumlah kelahiran ternak sapi unggul yang ditargetkan 2.500 berhasil dicapai 4.414 ekor sementara tahun 2016 kelahiran ternak sapi unggul hanya 2.293 ekor. Hal ini disebabkan untuk tahun 2017 kabupaten Pesisir Selatan mendapat amanat untuk melaksanakan UPSUS SIWAB dengan target akseptor 9.412 ekor tercapai 10.481 ekor (118%). Untuk pengembangan itik Bayang dan ayam lokal untuk menunjang peningkatan produksi telur masih sama untuk tahun 2016 dan 2017 karena memang ditargetkan hanya untuk 3 kelompok dalam bentuk telur bibit, mesin tetas dan bantuan pakan untuk DOD dan DOC.

Dari gambaran pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian meningkatnya nilai produksi lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan meningkatnya usaha peternakan rakyat melalui upaya peningkatan populasi khususnya dengan adanya program UPSUS SIWAB (Upaya khusus sapi betina wajib bunting) serta upaya pengembangan budidaya itik bayang dan ayam lokal. Secara rinci produksi daging dicapai 95,79% (sangat baik), ini menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena besarnya tingkat produksi daging ditentukan oleh banyaknya pemotongan ternak oleh masyarakat, banyaknya pemotongan ternak oleh masyarakat ditentukan oleh tingkat kemampuan masyarakat membeli ternak untuk di potong dan di konsumsi.

Tingkat capaian sasaran peningkatan produksi telur mencapai 104,30% (sangat baik), ini menunjukkan bahwa upaya kita untuk mengembangkan budi daya itik bayang dan budi daya ayam lokal cukup berhasil ditengah masyarakat. Sejak tahun 2016 telah dilakukan upaya pengembangan

penangkaran itik bayang di dua kecamatan yaitu Sutera dan Lengayang sebanyak 3 kelompok, dilanjutkan tahun 2017 juga 3 kelompok. Sementara budidaya ayam lokal baru dilaksanakan pada tahun 2017 dengan kelompok 3 kelompok tani ternak yaitu kelompok tani ternak Jengger di kecamatan IV Jurai, kelompok tani ternak anak nagari di Ampang Pulau kecamatan Koto XI Tarusan dan KWT Mandiri Sakato di Nyiur Melambai kecamatan Ranah Pesisir.

a. Produksi daging

Secara umum produksi daging untuk tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016, yang mengalami penurunan adalah produksi daging kambing. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tingkat ekonomi masyarakat, dimana jumlah masyarakat yang mampu membeli sapi untuk dipotong menjadi lebih banyak dibanding tahun 2016. Dari data pemotongan ternak tercatat (pemotongan ternak di hari besar Islam) tahun 2017 dibanding tahun 2016 terjadi peningkatan, pemotongan ternak sapi tahun 2017 sebanyak 5.819 ekor sedangkan tahun 2016 sebanyak 5.477 ekor dan ternak kerbau tahun 2017 sebanyak 187 ekor, lebih banyak dibanding tahun 2016 sebanyak 170 ekor. Sedangkan kambing turun dari 1.723 ekor tahun 2016 menjadi 1.628 tahun 2017. Persentase peningkatan produksi daging tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.1
Perkembangan Produksi Daging dan Populasi Ternak
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

No.	Uraian	Satuan	Tahun		
			2015	2016	2017
1.	Populasi Ternak				
	a. Sapi Potong	Ekor	80.146	80.976	84.087
	a. Kerbau	Ekor	8.271	8.430	8.823
	b. Kambing	Ekor	41.699	40.451	36.649
	c. Ayam buras	Ekor	779.819	780.056	790.932
	d. Ayam potong	Ekor	552.500	2.105.000	1,463,220
	e. Ayam Ras petelur	Ekor	85.300	96.700	97.043
	f. Itik	Ekor	147.921	154.050	155.894
2.	Produksi Daging	Kg	3.536.025	4.505.346	4.596.386
	a. Sapi Potong	Kg	1.026.920	1.045.285	1.060.076
	b. Kerbau	Kg	46.204	37.878	40.564
	c. Kambing	Kg	40.073	38.145	27.755

	d. Ayam buras	Kg	836.356	955.569	968.892
	e. Ayam potong	Kg	1.463.220	2.267.338	2.330.048
	f. Ayam petelur	Kg	62.235	70.552	70.803
	g. Itik	Kg	61.017	61.628	69.338
3	Persentase Peningkatan produksi daging			27,41	2,02
4.	Konsumsi Daging		1.531.578	1.836.656	1.827.022
	a. Sapi Potong	Kg	819.483	834.137	896.386
	b. Kerbau	Kg	28.850	28.787	29.180
	c. Kambing	Kg	18.389	28.990	21.094
	d. Ayam buras	Kg	389.101	561.206	478.203
	e. Ayam potong	Kg	223.608	324.584	337.554
	f. Ayam Ras petelur	Kg	20.103	21.698	22.687
	g. Itik	Kg	32.045	37.254	41.918

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2018

b. Produksi telur

Produksi telur unggas (Ayam Buras, Ayam Ras Petelur dan Itik) meningkat dari 2.089.552 kg di tahun 2016 menjadi 2.170.739 kg di tahun 2017. Persentase peningkatan produksi telur adalah 3.89% di tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.2.
Perkembangan Produksi dan Persentase Produksi dan Konsumsi Telur serta Populasi Unggas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

No.	Uraian	Satuan	Tahun		
			2015	2016	2017**
1.	Populasi Ternak				
	a. Ayam Buras	Ekor	779.819	785.356	790.932
	b. Ayam Ras Petelur	Ekor	85.300	89.565	97.043
	c. Itik	ekor	147.921	149.400	167.091
2	Produksi Telur Unggas	Kg	1.544.552	1.645.104	1.680.940
	a. Ayam Buras	Kg	327.524	498.261	505.208
	b. Ayam Ras	Kg	542.508	745.557	748.202
	c. Itik	Kg	674.520	845.735	917.330
3.	Persentase Peningkatan Produksi Telur	%	(3,53)	6,51	3.89
4.	Konsumsi Telur	Kg	1.064.391	1.453.088	1.511.335

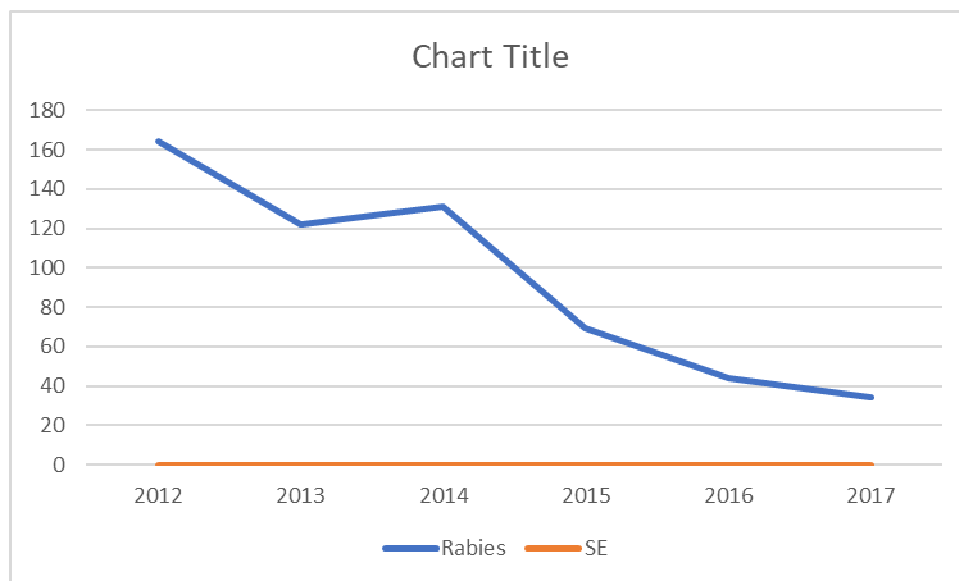
Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2018

2. Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis

Dengan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan maka secara bertahap kasus penyakit di kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan. Perkembangan kasus penyakit di kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.4.3.

No	Tahun	Kasus Penyakit	Persentase penurunan
1	2015	69 kasus	47,33
2	2016	44 kasus	36,23
3	2017	34 kasus	29,41

Diagram penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis di kabupaten Pesisir Selatan tahun 2012-2017



Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis peningkatan nilai produksi peternakan adalah :

1. Program peningkatan produksi peternakan
2. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
3. Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan
4. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan

5. Program Penerapan Teknologi Peternakan
6. Program Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran merupakan alat ukur besarnya serapan dana dari anggaran yang disediakan untuk menunjang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Anggaran dan realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, tercantum pada tabel 3.5.

Tabel. 3.5

**Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang
Sasaran Strategis Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Tahun Anggaran 2017**

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2017		
			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan nilai Produksi peternakan	1. Program peningkatan produksi peternakan	1,654,924,700	1,645,536,194	99.43
		2. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	679,072,126	666,972,310	98.22
		3. Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan	330,724,260	327,932,936	99.16
		4. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	79,337,010	76,272,200	96.14
		5. Program Penerapan Teknologi Peternakan	173,871,278	173,833,190	99.98
		6. Program Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan	156,006,300	154,942,300	99.42
2	Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis	1. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1,654,924,700	1,645,536,194	99.43
		2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak	679,072,126	666,972,310	98.22
Total			3.631.310.088	3.551.981.966	98,36

Tabel 3.6.
Realisasi Anggaran Per program Kegiatan Tahun Anggaran 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Belanja (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
A.	BELANJA LANGSUNG	4,227,111,220	4,157,709,614	98.36
1	Program Pelayanan Administrasi Perakantoran	737,853,246	727,466,717	98.59
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	44,264,000	43,916,084	99.21
	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	147,050,000	142,850,000	97.14
	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	5,458,000	5,458,000	100.00
	4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20,540,000	20,447,000	99.55
	5 Penyediaan alat tulis kantor	34,846,246	34,846,246	100.00
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24,738,000	23,510,000	95.04
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	56,387,000	56,387,000	100.00
	8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	114,530,000	110,308,950	96.31
	9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000	4,900,000	98.00
	10 Penyediaan makanan dan minuman	24,090,000	24,021,000	99.71
	11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	154,450,000	154,442,437	100.00
	12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	106,500,000	106,380,000	99.89
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	312,068,700	283,678,750	90.90
	1 Pengadaan mebeleur	59,400,000	59,200,000	99.66
	2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	77,178,000	75,531,050	97.87
	3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	175,490,700	148,947,700	84.87
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	45,000,000	44,432,832	98.74
	1 Pendidikan dan pelatihan formal	45,000,000	44,432,832	98.74
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	58,253,600	56,642,185	97.23
	1 Monitoring dan evaluasi kegiatan	30,000,000	29,900,000	99.67
	2 Penyusunan Renstra, LAKIP, LKPJ dan LPPD	28,253,600	26,742,185	94.65

5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	679,072,126	666,972,310	98.22
	1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	313,409,842	312,732,738	99.78
	2 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	252,466,022	248,531,760	98.44
	3 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	73,476,422	69,419,272	94.48
	4 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Rabies	39,719,840	36,288,540	91.36
6	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1,654,924,700	1,645,536,194	99.43
	1 Pembibitan dan perawatan ternak	256,133,578	255,030,078	99.57
	2 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	275,796,300	275,287,900	99.82
	3 Peningkatan mutu genetik IB	332,495,310	328,259,571	98.73
	4 Pemberdayaan kelembagaan dan usaha peternakan	209,085,940	208,458,082	99.70
	5 Budidaya itik bayang	89,801,032	88,649,032	98.72
	6 Budidaya ayam Lokal	82,667,370	81,629,620	98.74
	7 Penyusunan Action plan	91,147,320	90,614,061	99.41
	8 Pengembangan ternak untuk menunjang percepatan pembangunan	317,797,850	317,607,850	99.94
7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak	330,724,260	327,932,936	99.16
	1 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	330,724,260	327,932,936	99.16
8	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	173,871,278	173,833,190	99.98
	1 Penerapan Teknologi Peternakan	173,871,278	173,833,190	99.98
9	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	79,337,010	76,272,200	96.14
	1 Pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau	79,337,010	76,272,200	96.14
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan	156,006,300	154,942,300	99.32
	1 Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian Mendukung Peternakan	156,006,300	154,942,300	99.32

Dari tabel 3.5. dan 3.6 diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 untuk menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2017 sebesar Rp 3.631.310.088,00 terealisasi sebesar Rp 3.551.981.966,00 atau 99.07%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 0,93% atau secara absolut sebesar Rp 28,446,544,,00.-

- b. Sisa anggaran sebesar Rp 28,446,544,,00 mencerminkan sudah akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan.

IV. PENUTUP

Dari data yang disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi Perencanaan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan PERDA nomor 8 tahun 2016, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Tingkat pencapaian kinerja anggaran pada tahun 2017 untuk APBD terealisasi sebesar 98,36 %. Program/kegiatan yang dialokasikan tahun 2017 sesuai dengan kondisi lokasi dan kebutuhan masyarakat/petani ternak di lapangan/daerah sasaran. Hal ini meliputi penyediaan sarana pelayanan Inseminasi Buatan melalui program UPSUS SIWAB, Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam bentuk Pos pelayanan Terpadu peternakan (Posyandunak), bimbingan dan pembinaan kelembagaan usaha peternakan, penerapan teknologi peternakan tepat guna, fasilitasi bantuan kredit lunak melalui program KUR, bantuan pengelolaan pasar ternak dan bantuan sarana prasarana penunjang usaha peternakan .
3. Dengan adanya dukungan program/dana mampu meningkatkan produksi di sektor peternakan terutama pada peningkatan populasi ternak, produksi daging dan telur. Juga berkurangnya kasus penyakit zoonosis lainnya di kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) ini telah disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja pembangunan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2017. Besar harapan Kami kiranya dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk pembangunan tahun berikutnya.

Painan, Februari 2018
Kepala Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan

Drh. Hj. HAZRITA, MM
NIP. 19590613 198603 2 001